

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya organisasi sektor publik yang percaya bahwa masyarakatlah yang membutuhkan organisasi sektor publik sehingga birokrasi Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang baik dalam reformasi saat ini. Publik kehilangan kepercayaan terhadap kinerja organisasi sektor publik sebagai akibat dari anggapan ini, dan mereka juga sering dikritik atas tindakan mereka dalam menerapkan kebijakan dan prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum. Tata pemerintahan yang baik adalah sesuatu yang sulit dicapai Indonesia. Di sini dan sekarang, semuanya jelas tidak seperti yang diharapkan. Tata pemerintahan yang baik tidak seperti yang diharapkan karena isu-isu seperti kepentingan politik, KKN, keadilan yang tidak adil, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya sumber daya dan akuntabilitas kepada publik. Peningkatan kepercayaan publik yang dihasilkan terhadap efisiensi lembaga pemerintah diharapkan berasal dari dorongan pemerintah kepada organisasi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good government governance*.

Mereka yang bekerja di sektor publik memiliki standar yang sama dengan pemerintah. Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab tidak akan terwujud kecuali masyarakat yang akan terkena dampaknya secara aktif terlibat dalam mewujudkannya. Dalam skenario ini, masyarakat akan stabil dan berkontribusi aktif dalam penentuan kebijakan pemerintah, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan yang efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang akan membantu masyarakat tumbuh menjadi masyarakat yang bermanfaat. Partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam sistem aktualisasi untuk memastikan administrasi yang tepat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Situmorang dkk, 2020) menjelaskan bahwa *good governance* lebih mungkin terwujud sebagai hasil dari partisipasi masyarakat, yang saat ini berfungsi secara efektif. Namun, ada kekurangan kewajiban sipil dan keterlibatan dalam acara-acara komunitas, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian sebelumnya (Samad dkk, 2019) Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat jauh di bawah yang diharapkan.

Akuntabilitas adalah landasan pemerintahan yang efektif. Gagasan bahwa administrator akuntabilitas dapat dipertanyakan dan pada akhirnya dimintai

pertanggungjawaban atas tindakan mereka atas nama transparansi dan pelayanan publik telah muncul sebagai isu yang paling mendesak di bidang akuntabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Perwujudan tanggung jawab atas pencapaian atau ketiadaan tujuan organisasi yang dinyatakan merupakan akuntabilitas. Menurut Mahayani, (2017) bahwa Akuntabilitas adalah tanggung jawab atas kinerja pejabat publik sesuai dengan peraturan terkait dalam hal melayani publik, pejabat publik memiliki standar profesionalisme yang lebih tinggi yang dikenal sebagai akuntabilitas publik. Menurut temuan studi Ashari (2019) akuntansi mempunyai peran penting dalam mencapai tata kelola yang baik. Kontribusi akuntansi untuk mencapai akuntabilitas, dalam memfasilitasi pembuatan laporan tentang efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kinerja dan akuntabilitas mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (Zawawi, 2016) menunjukkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jelas tidak disiapkan oleh pejabat pemerintah yang berkompeten, karena sangat menyimpang dari standar yang dipersyaratkan.

Kemampuan publik untuk mempertimbangkan dan akuntabilitas pejabat pemerintah keduanya merupakan komponen penting dari setiap sistem pemerintahan yang efektif. Seperti yang dijelaskan Mardiasmo (2009) *good governance* adalah metode untuk meningkatkan sektor publik secara keseluruhan. Terwujudnya *good government governance* sangat penting bagi masyarakat untuk mencapai kinerja pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat dengan aturan yang berlaku bagi semua orang. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien, tata pemerintahan yang baik bergantung pada beberapa faktor, seperti proses perumusan tingkat kinerja pemerintah, perumusan arus investasi, dan komunikasi pemerintah dengan sumber daya manusia di dalam pemerintahan. Berdasarkan dari penelitian Samad dkk (2019) menemukan bahwa selama pemerintahan di Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sudah baik, pelaksanaannya tidak optimal karena prinsip akuntabilitas atau karena akuntabilitas yang buruk, yang pada gilirannya menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.

Dalam rangkaian *Innovative Government Award* (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2021 Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten terinovatif se-Indonesia (Ardian, 2021). Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten terinovatif sejak tahun 2018 sampai 2021. Artinya Banyuwangi dalam inovasi dan pelayanan publiknya sudah baik dan tata kelola pemerintahannya juga baik. Kunci bagi daerah dalam mempercepat serta mengakselerasi pembangunan yaitu adanya inovasi. Namun

Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa kekurangan dalam hal dana, SDM (Sumber Daya Manusia), serta waktu. Terdapat beberapa daerah yang berada di Kabupaten Banyuwangi yang masih kurang dalam mengelola tata pemerintahannya. Sehingga inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya terutama pada instansi pemerintahan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada suatu instansi pemerintahan harus adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Adapun fenomena yang terjadi di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yaitu terdapat beberapa daerah yang mempunyai keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) belum merata. Serta mempunyai keterbatasan dalam hal dana, masih terdapat beberapa wilayah desa yang terpantau jalannya masih rusak dan berlubang serta belum ada penanganan. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa belum adanya pertanggungjawaban dari pemerintah daerah setempat.

Dari hasil penelitian Wafa dkk (2020) bahwa terwujudnya *good government governance* secara signifikan dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat (*good governance*). Kesimpulannya, *good governance* di desa dapat memperoleh manfaat dari peningkatan partisipasi jika dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Partisipasi masyarakat berpengaruh tapi tidak signifikan terdapat di penelitian (Dwi Putra, 2021), bahwa hal ini berarti partisipasi tidak memberikan dampak dalam mewujudkan *good government governance*.

Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada penelitian (Situmorang dkk, 2020). Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas yang melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuannya sudah berjalan dengan baik. Namun dalam penelitian (Prabawa dkk, 2020) menghasilkan bahwa agar tata kelola yang baik terwujud, variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan. Untuk itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa kekurangan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi kontemporer akan berdampak negatif pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dampak Partisipasi dan Akuntabilitas Masyarakat dalam Mewujudkan *Good Government Governance* di Desa-desa di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi adalah judul penelitian ini yang dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus yang unik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berpengaruh positif

dan signifikan dalam mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada Desa se-Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang diambil yaitu :

1. Apakah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa?
2. Apakah akuntabilitas dalam mewujudkan *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas dalam mewujudkan *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan studi ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi akumulasi data baru dan pemahaman tentang *Good Government Governance*, yang pada gilirannya akan memfasilitasi peningkatan administrasi kota di pedesaan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menerapkan apa yang telah dipelajari di perkuliahan untuk menemukan dan mengkontraskan teori dan kenyataan di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pemahaman mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good government governance* terhadap pembangunan desa.

2) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam mewujudkan *good government governance* terhadap pembangunan desa sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Desa se-kecamatan Purwoharjo Banyuwangi.

3) Bagi Pembaca

Penulis berharap agar penelitian ini bisa dijadikan acuan referensi untuk peneliti dimasa mendatang dan menambah ilmu mengenai bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good government governance* terhadap pembangunan desa.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Memberikan arahan kebijakan bagi Desa Se-Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan demi terwujudnya *good government governance*.

